

KEGIATAN DPR-RI

MINGGU KEEMPAT SEPTEMBER 2012

Rangkuman berita kegiatan AKD DPR dalam edisi minggu keempat September 2012 ini, memuat berbagai kegiatan di bidang anggaran, pengawasan, dan dan kegiatan Ketua DPR. Sidang Umum AIPA (Parlemen Negara-Negara ASEAN) yang berlangsung 17-21 September, juga turut mewarnai laporan kegiatan minggu ini. Berikut ringkasannya:

Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI 16 Agustus

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Tim Pengawas Century dengan Mantan Wapres Jusuf Kalla pada 19 September, meminta penjelasan/keterangan mengenai Kasus Bank Century. RDPU ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas Timwas Century untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekomendasi DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 3 Maret 2010. Dalam RDPU tersebut, disimpulkan bahwa Timwas Century: [1] mengapresiasi KPK yang terus berupaya memuntaskan kasus Bank Century. Namun, Timwas berpendapat bahwa progress yang disampaikan oleh KPK belum sepenuhnya memenuhi harapannya. [2] menendorong KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus Bank Century, terutama dalam aspek penegakan hukum sebelum berakhirnya masa tugas Timwas Century pada Desember 2012.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam rangka pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2012, Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 4 September 2012 telah membentuk 3 (tiga) Panja yaitu: (1) Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; (2) Panja Belanja Pemerintah Pusat; dan (3) Panja Transfer ke Daerah. Selain itu juga dibentuk Tim Perumus Draft RUU.

Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan telah melakukan rapat panja tanggal 17 s.d 21 September 2012. Adapun materi yang dibahas, antara lain asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga SPBN, harga minyak, lifting minyak dan lifting gas. Panja juga antara lain melakukan pembahasan terhadap penerimaan migas,

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie



PNBP Non Migas, PNBP Lainnya, Hibah, Subsidi Energi, Bagian Laba BUMN, Defisit serta Pembiayaan Utang dan Non Utang.

Selanjutnya hasil pembahasan Panja Asumsi, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan akan dirumuskan oleh Tim Perumus dan akan dilaporkan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/ Kepala Bappenas yang direncanakan dalam minggu ini.

Sidang Umum AIPA ke-33 di Lombok NTB

Sidang Umum AIPA ke 33 di Lombok, yang berlangsung 17-22 September 2012, dihadiri oleh 292 peserta, diantaranya adalah anggota parlemen dari 10 negara anggota AIPA, dan 9 anggota parlemen negara observer. Kehadiran dan partisipasi perempuan parlemen di Sidang umum AIPA ini cukup signifikan, mencapai 25% dari total anggota parlemen AIPA yang hadir.

Sidang Umum AIPA ke 33 di Lombok dibuka oleh Wakil Presiden Prof Dr. Boediono pada tanggal 17 September malam hari. Pada pembukaan Sidang Umum AIPA yang dihadiri oleh Ketua ASEAN yang juga Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Wapres Prof. Dr. Boediono, Presiden AIPA Dr. marzuki Alie mengatakan bahwa tema Sidang umum AIPA ke-33 adalah "Strengthening the Parliamentary Roles Towards the ASEAN Community 2015" dipilih dengan maksud memberikan arti bagi peran aktif para wakil rakyat di kawasan, dalam transformasi ASEAN menuju integrasi ASEAN melalui pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. AIPA menyadari posisi dan peranannya yang berpengaruh terhadap transformasi ASEAN. Kesamaan langkah di antara ASEAN dan AIPA merupakan salah satu aspek yang menentukan kualitas pencapaian atas berbagai aktivitas dan upaya yang dilaksanakan oleh AIPA, sebab

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Djaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Dwi Maryanto, S.Sos (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP.,MH (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Rizka Arinindya; Sugeng Irianto, S.Sos; Iwan Armanias; Suciati, S.Sos; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra; **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

eksistensi AIPA berkaitan langsung dengan tujuan dan eksistensi ASEAN terkait upaya bersama bagi kepentingan masyarakat kawasan. AIPA menyadari bahwa seiring makin dekatnya tenggat waktu 2015 masih terdapat tantangan signifikan yang menghadang, sehingga parlemen perlu terlibat dan berpartisipasi untuk mewujudkan cita-cita tersebut terutama para anggotanya, yang mempunyai fungsi *legitimate representative of the people*. Selain itu, Presiden AIPA juga menyampaikan bahwa selama ini AIPA aktif berkontribusi menanggulangi berbagai isu keamanan non-konvensional, terutama melalui dialog secara rutin dalam bentuk “meeting of the AIPA Fact Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace.

Sementara itu, Ketua ASEAN Hun Sen memaparkan bahwa pasca krisis global, ASEAN telah berubah menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. ASEAN telah menjadi pemain yang berpengaruh di Asia, mitra strategis yang tidak dapat tergantikan dari negara-negara dan organisasi besar di dunia. Capaian penting yang berhasil dibuat adalah, total PDB Asean telah menunjukkan kemajuan berarti dari US\$ 1,9 triliun pada tahun 2010 meningkat menjadi US\$ 2,2 triliun pada tahun 2011. Total perdagangan Asean juga telah meningkat signifikan dari US\$ 2 triliun tahun 2010 dan tahun 2011 mencatat rekor baru US\$ 2,4 triliun. Hun Sen mengingatkan, bahwa upaya mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN saat ini, memiliki tantangan global maupun kawasan yang cukup panjang. Tantangan itu diantaranya masalah perekonomian yang rentan, krisis utang yang berkepanjangan di Eropa, gojang ganjing sosial dan politik

di Timur Tengah dan Afrika Utara, tingginya harga minyak, ketahanan pangan dan energi, perubahan iklim, bencana alam dan terorisme serta kejahatan lintas batas. Masalah kesenjangan pembangunan di negara-negara ASEAN telah berkurang selama beberapa tahun terakhir, namun tidak dipungkiri kesenjangan yang ada masih tetap signifikan. Upaya bersama AASEAN perlu ditambah dengan dukungan dari AIPA untuk melaksanakan semua instrumen dan rencana kerja ASEAN, termasuk roadmap pembangunan masyarakat Asean 2009–2015.

Sesudah Pidato Hun Sen, Wapres Boediono dalam pidato pembukaan, mengharapkan agar AIPA membantu terwujudnya cita-cita Komunitas ASEAN yang tinggal dua tahun lagi. Wapres Boediono menyoroti peran khusus dari AIPA dalam upaya bersama mewujudkan cita-cita bersama ASEAN. AIPA sebagai asosiasi parlemen negara-negara anggota ASEAN mempunyai dua ciri penting. Pertama, AIPA adalah asosiasi para wakil rakyat di ASEAN, dan kedua, AIPA adalah asosiasi legislator (*law makers*) yang bertugas membuat undang-undang. Sebagai kumpulan wakil rakyat, AIPA dapat berperan menjadi lembaga yang berada di garis depan untuk membantu memantapkan dan memperkuat ASEAN, bukan saja sebagai asosiasi antar pejabat dan pemimpin negara, tetapi juga antar rakyat (*people to people*). Para wakil rakyat dapat menyebarkan gagasan, visi dan kemajuan ASEAN kepada masing-masing konstituennya, sehingga ASEAN dapat menjelma menjadi kumpulan antar rakyat yang makin kohesif. Dengan demikian, maka integrasi ASEAN menjadi lebih solid dan kuat. Sebagai kumpulan



President of AIPA Marzuki Alie saat konferensi Pers hasil sidang AIPA Ke 33 di Lombok NTB, Jumat 21 September 2012

legislator, AIPA dapat bertukar informasi dan pandangan tentang pengalaman masing-masing Parlemen mengenai proses dan hasil perancangan berbagai undang-undang yang menyangkut hajat hidup rakyatnya.

Sebelum upacara pembukaan, Sidang Umum AIPA ke-33 ini, telah diawali dengan pertemuan Woman Parliamentarians of AIPA (WAIPA). Pertemuan WAIPA membahas tiga draft resolusi, yaitu draft resolusi dukungan anggota ASEAN dalam memperkuat kerjasama dalam menerapkan roadmap Millenium Development Goals (MDGs) untuk memperkecil gaps diantara anggota ASEAN, draft resolusi mengenai peran parlemen perempuan dalam memperkuat kebijakan yang pro perempuan di berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan, dan terakhir yaitu draft resolusi peningkatan pembangunan kapasitas dan pelatihan khusus bagi perempuan di pedesaan.

Dalam sambutan di Pertemuan WAIPA ini, Presiden AIPA Dr. Marzuki Alie mengatakan, permasalahan terkait kaum perempuan di Asia Tenggara sangat kompleks yang berakar dari ketidakadilan perlakuan terhadap kaum perempuan, sehingga dibutuhkan pendekatan yang bersifat komprehensif, yang mampu mengurai kompleksitas persoalan dan menemukan solusi. Tidak hanya *'affirmative action'* dan beragam instrumen internasional lainnya, namun juga *'just gender-mainstreaming paradigm'* yang harus mengakar kokoh dalam diri para pemimpin dan masyarakat Asia Tenggara. Penanganan permasalahan perempuan harus diberikan perhatian pada perubahan kultur yang ada di dalam individu dan masyarakat kawasan ASEAN. Seberapapun baiknya bahasa hukum yang memberikan perlindungan, pemberdayaan dan penanganan persoalan yang terkait dengan kaum perempuan, tidak akan berhasil efektif jika budaya individu dan budaya masyarakat di suatu wilayah belum *'positive'* dan *'supportive'* terhadap pengarusutamaan keadilan gender.

Hal lain yang menjadi pembahasan di Sidang Umum AIPA adalah mengenai munculnya penyikap yang bijak dalam isu spesifik mengenai Laut China Selatan. Setelah melalui pembahasan Executive Committee dan dengan menampung masukan dari seluruh delegasi AIP, Presiden

AIPA menawarkan solusi untuk memperluas dinamika pembahasan Laut China Selatan menjadi *maintaining peace and stability in the region*. AIPA sepakat bahwa isu Laut China Selatan merupakan salah satu bagian dari seluruh isu yang perlu ditangani secara mendasar oleh Negara anggota AIPA dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Ketua Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Drs. H. Priyo Budi Santoso, menyampaikan bahwa: Sejak empat dasawarsa yang lalu, AIPA selalu berdiri tegak di garda terdepan sebagai mitra konstruktif ASEAN dalam meretas kawasan Asia Tenggara yang lebih damai dan sejahtera. Konsistensi peran dan upaya AIPA ini akan terus membahana dan melaju kencang di tengah gelombang tantangan kerjasama regional. Tak terkecuali pada Sidang Umum kali ini, kita tertantang untuk mengolah-usahakan solusi atas rangkaian masalah yang terbentang dari kejahatan pencucian uang, implementasi ekonomi hijau, pengentasan kemiskinan dan upaya mengurangi kesenjangan pembangunan, penanganan bencana alam hingga peningkatan peran Anggota Parlemen Perempuan dalam membangun Asia Tenggara.

Merebaknya kejahatan pencucian uang dewasa ini sangat memperhatikan. Sistem moneter dan perbankan yang semakin modern itu ternyata masih menyisakan celah bagi lahirnya praktik-praktik tidak terpuji ini. Kejahatan pencucian uang telah menggerus ekonomi negara-negara ASEAN. Oleh sebab itu, Delegasi Indonesia menghimbau Parlemen-Parlemen Anggota AIPA untuk mengasah fungsi legislasi di dalam menyulam rezim anti-pencucian uang di masing-masing negara. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN juga harus menjadi arsitek peraturan dan pengawasan yang dapat menangkalkan kejahatan kerah putih ini.

Kelangkaan pangan dan ketimpangan pembangunan global yang terjadi dewasa ini bukanlah warisan yang ingin kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Kita harus mensinsingkan lengan untuk mempersempit kesenjangan pembangunan ekonomi dan sosial sekaligus meniti bumi yang ramah lingkungan. Disinilah AIPA tidak boleh abai terhadap pengembangan Ekonomi Hijau. Kami percaya bahwa Ekonomi Hijau adalah penyangga ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan dan menanam benih bagi pengembangan teknologi ramah lingkungan. Bangunan Ekonomi Hijau ini tentu mensyaratkan dukungan keparlemen yang solid.

Delegasi Indonesia dan seluruh masyarakat ASEAN menggantungkan harapan yang tinggi terhadap Sidang Umum ke-33 AIPA untuk menjadi api unggun semangat memperbaiki kerjasama kawasan. Kita tidak sepatutnya berhenti hanya mendapati kelancaran dalam persidangan ini namun rajutan rekomendasi konkrit yang di sulam di dalam beragam resolusi harus dapat ditransliterasi menjadi kebijakan riil di kawasan.

Dengan berakhirnya Sidang Umum AIPA ke-33, masa jabatan Ketua DPR-RI sebagai Presiden IAPA periode 2011-2012 berakhir. Jabatan Presiden AIPA berikutnya dijabat oleh Brunei Darussalam, dan penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-34 akan berlangsung di Bandar Seri Begawan, September 2013.**



President of AIPA Marzuki Alie memberikan cinderamata kepada Delegasi Myanmar, Jum'at 21 September 2012

Timwas Century DPR Desak Pemerintah Bekerja Keras Kembalikan Aset

Tim Pengawas kasus Bank Century DPR (Timwas) mendesak Pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam pengembalian aset Bank Century yang ada di luar negeri.

Dalam menarik aset diakui terdapat banyak kesulitan dan hambatan, termasuk dalam menghadapi klaim dari pihak ketiga, namun Pemerintah harus melakukan segala daya upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Demikian kesimpulan rapat dengar pendapat Tim Pengawas kasus Century DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Pramono Anung di Gedung DPR Senayan, Rabu (26/9) dengan Jaksa Agung Barief Arief, Menkumham Amir Syamsudin dan Sekretaris Mensesneg Lambock V. Nahattand.

Lebih lanjut Pramono mengemukakan, aset Bank Century yang dilarikan keluar negeri sangat penting artinya untuk mengembalikan kerugian negara dengan memberi ganti rugi bagi nasabah Antaboga Delta Security. Untuk itu Timas Century DPR mendesak tim bersama pemerintah untuk dapat memberikan kepastian hukum mengenai pengembalian aset sebelum akhir masa tugas Timwas Century DPR pada Desember 2012.

“ Kalau tidak berhasil katakan tidak berhasil, kalau berhasil dijelaskan, karena itu merupakan bagian dari laporan Timwas kepada Rapat paripurna pada akhir tahun ini, ” tegasnya.

Dalam acara yang beragendakan laporan mengenai penanganan pengembalian aset Bank Century di luar negeri ini, Menkumham Amir Syamsudin menjelaskan bahwa pengadilan Hongkong telah membekukan sejumlah aset bank Century senilai sekitar Rp 15 triliun. Namun diakui untuk menarik aset tersebut banyak kesulitan dan hambatan yang menghadang, termasuk gugatan pihak ketiga. Sementara pemerintah untuk membayar pengacara di luar negeri memerlukan biaya yang besar pula.

Belum lagi pengadilan in absentia kepada para pihak yang telah diputus oleh pengadilan Indonesia, di luar negeri seperti di Swis tidak dikenal, sehingga untuk mengembalikan aset Century mengalami hambatan. Wakil jaksa Agung Darmono yang mendampingi Basrief Arief mengatakan aset Bank Century yang diberada di Swis sebesar 155,9 juta US\$. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan sekarang masih dalam proses perdata. Sedangkan aset Bank Century yang berada di Singapura menurut Wakil Jaksa Agung Darmono hingga kini belum terdeteksi.

Sejumlah anggota Timwas DPR menanggapi laporan pemerintah ini menilai tidak ada kemajuan berarti. Bahkan anggota Timwas dari PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, mengingat banyaknya hambatan apakah perlu dipertimbangkan pemer-

intah untuk “ lempar handuk ” dalam pengembalian aset Bank Century dari luar negeri. Apalagi menurut anggota FPDIP Sidarto Danusubroto menegaskan bahwa upaya pengembalian aset dari luar negeri tidak pernah berhasil.

Anggota Timwas dari PKS Fahry Hamzah menyatakan kecewa atas laporan perkembangan pengembalian aset yang dinilai tidak sesuai harapan, sebab tidak ada rincian tahapan sesuai rekomendasi DPR yaitu pertama masalah penegakan hukum, aset recovery, pengembalian uang nasabah dan koreksi peraturan perundang-undangan. Yang pertama saja soal penegakan hukum tidak berjalan, bagaimana melakukan langkah selanjutnya. “ Harus ada keberanian untuk mengeluarkan keputusan besar sehingga kasus ini bisa tuntas, ” kata Fahry menegaskan. (mp)/ foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat memimpin rapat Timwas Century.

DPR Siap Mengoptimalkan Fungsi Legislasi

Dalam Masa Persidangan I, tahun sidang 2012/2013 selain fokus untuk melakukan penyelesaian pembahasan RUU APBN 2013, DPR siap mengoptimalkan fungsi legislasi.

Demikian dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie, pada saat melantik Anggota DPR pengganti antar waktu, di ruang Operasional Room DPR Senayan Jakarta, Rabu (26/9) pagi.

Anggota DPR yang dilantik pengganti antar waktu (PAW) adalah Efi susilowati dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II menggantikan Theresia EE Pardede dari Fraksi Partai Demokrat dan Hj. Ryani Soedirman dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II menggantikan Hj, Mariani Akib Baramuli, dari Fraksi Partai Golkar.

Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidatonya mengatakan, RUU prioritas yang telah selesai dibahas pada masa sidang I ini adalah RUU tentang Pendidikan Tinggi dan RUU tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Marzuki Alie menambahkan, RUU tentang Pendidikan Tinggi juga yang pembahasannya mengalami beberapa kali perpanjangan, telah diselesaikan,

dan pembahasannya telah dilakukan secara ketat dan komprehensif dengan menerima banyak masukan dari kelompok-kelompok masyarakat, pemangku kepentingan dan para pemerhati dunia pendidikan.

Sedangkan UU Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah selesai setelah mengalami beberapa penundaan. Dalam UU ini akhirnya disepakati mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dan juga disepakati peraturan mengenai masalah pertanahan yang menjadi kewenangan kesultanan dan kadipaten yang dinyatakan sebagai badan hukum yang bersifat khusus.

Dalam masa sidang ini, masih ditunggu beberapa RUU yang siap untuk memasuki pembicaraan tingkat II, antara lain RUU tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar, RUU tentang Pangan, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pendidikan Kedokteran, dan RUU

tentang Organisasi Masyarakat.

Ketua DPR Marzuki Alie mengemukakan, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi-Komisi DPR telah melakukan Rapar Kerja dengan mitra kerja membahas laporan kunjungan kerja Komisi, disamping itu, Tim pengawas Century juga telah melakukan kegiatan antara lain mengundang Mantan Ketua KPK Antasari Azhar dan mantan Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla.

Pemanggilan kedua mantan pejabat tersebut untuk meminta penjelasan/keterangan mengenai kasus Bank Century, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pelaksanaan tugas Timwas Century untuk mengawasi dan mengawal pelaksanaan rekomendasi DPR sebagaimana keputusan Rapat Paripurna tanggal 3 Maret 2010.

Marzuki Alie menegaskan, kematangan berdemokrasi bangsa Indonesia makin teruji dengan telah berlangsungnya Pemiluakada DKI Jakarta secara aman dan tertib, baik pada putaran I maupun putaran II. "Kita semua masih menunggu hasil resmi dari KPUD DKI Jakarta untuk menetapkan siapa Gubernur dan Wakil Gubernur definitif, tegas Marzuki Alie.

Pemilukada DKI mendapat perhatian masyarakat luas, termasuk media internasional, karena proses dan hasil Pemiluakada DKI ini akan memberikan gambaran, atau menjadi ukuran kondisi keberhasilan pembangunan demokrasi di Indonesia saat ini.

Dia mengemukakan, yang terjadi di Jakarta selalu menjadi potret yang disebar keseluruh dunia, karena di Jakarta hadir semua perwakilan negara sahabat. "Kita berharap, keberhasilan Pemiluakada DKI ini menjadi barometer bagi keberhasilan pemiluakada di daerah lain, ungkap Marzuki Alie". (Spy). foto:wy/parle



Pidato Ketua DPR RI Marzuki Alie saat melantik Anggota PAW

DPR Akan Terus Perjuangkan RUU PPDK

DPR RI akan terus memperjuangkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) hingga tuntas.



Wakil Ketua Pansus RUU PPDK Alex Litaay pada rapat dengar pendapat dengan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan di Gedung DPR RI

Seluruh Fraksi DPR RI sepakat untuk terus membahas RUU ini, dan RUU ini juga telah disepakati dalam Rapat Paripurna DPR menjadi usul inisiatif DPR. Demikian disampaikan masing-masing juru bicara fraksi pada rapat dengar pendapat dengan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Rabu (26/9) di gedung DPR.

Agenda Pansus RUU PPDK sore itu adalah mendengarkan masukan atas tanggapan Pemerintah tentang RUU PPDK.

Wakil Ketua Pansus RUU PPDK Alex Litaay mengatakan, dalam menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU PPDK, Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri mengatakan DPR RI merumuskan RUU PPDK bertentangan dengan UUD 1945.

Konsep “Daerah Kepulauan” dalam RUU ini juga dianggap Pemerintah bertentangan dengan Hukum

Internasional maupun Peraturan Perundang-undangan dan akan menciptakan Negara dalam Negara.

Untuk itu, kata Alex, Pansus ingin mendengar tanggapan dari tujuh Provinsi Kepulauan (Gubernur Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, NTB, NTT, Bangka Belitung serta Ketua DPRD) yang terkait langsung dengan RUU ini untuk memberikan tanggapannya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Koordinator Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan yang juga Gubernur Maluku M.G. Lailossa mengatakan, pendapat dan pandangan Pemerintah bahwa DPR RI merumuskan RUU PPDK yang bertentangan dengan UUD 1945 merupakan suatu tindakan “pelecehan” secara hukum maupun politik terhadap institusi DPR RI.

Menurut Lailossa, pada dasarnya pandangan dan pendapat Pemerintah terhadap RUU PPDK “kering” dari

perspektif filosofis, sosiologis maupun psikologis, hanya berorientasikan pada aspek yuridis dan terkesan “pro-pokatif”.

Pada dasarnya RUU PPDK dikembangkan dalam kerangka pemikiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ber-Bhineka Tunggal Ika (berbeda tetapi satu). Konteks perbedaan berdasarkan karakteristik daerah antara daerah continental (terrestrial), daratan lebih besar dari lautan (terrestrial-akuatik) dan lautan lebih besar dari daratan (akuatik-terrestrial atau kepulauan), hendak menempatkannya dalam perbedaan perlakuan.

Apabila daerah provinsi dengan karakteristik akuatik terrestrial diperlakukan khusus dalam suatu undang-undang, maka hendaknya dilihat dalam konteks pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dalam bingkai NKRI.

Dasarnya adalah Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa”. Oleh karena itu, katanya, RUU ini nantinya hendaknya dilihat sebagai undang-undang yang dapat memperkuat NKRI, adanya pengakuan desentralisasi a-simetris dan suatu UU yang *lex specialis* dimana berbagai undang-undang yang bersifat umum harus mengabdikan pada UU PPDK tersebut.

Adanya wilayah kewenangan daerah provinsi kepulauan yang ditetapkan berdasarkan prinsip penarikan garis pangkal lurus kepulauan sebagaimana tercantum dalam *United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS)* 1982, hendaknya dilihat secara substansi sebagai upaya adopsi penggunaan norma dan bukan membentuk rezim hukum baru dalam negara.

Dia menegaskan, RUU PPDK ini

tidak bertentangan dengan Hukum Internasional, UUD 1945 maupun Peraturan Perundang-undangan.

Adanya daerah provinsi kepulauan, perlu mendapat pengaturan secara khusus karena keadaan geografis sebagai daerah kepulauan.

Oleh karena itu, dia sangat menyayangkan tanggapan Pemerintah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri memberikan kesimpulan demikian.

Lailossa menegaskan, RUU PPDK

juga tidak bertentangan dengan UU No.6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, karena RUU ini tidak memberikan kedaulatan di territorial laut kepada Daerah Kepulauan dan tidak membentuk rezim hukum baru, tetapi hanya memberikan kewenangan mengelola di wilayah laut yang lebih luas kepada Daerah Kepulauan.

Kebijakan Pemerintah yang menyamakan semua karakteristik daerah selama ini, justru yang menimbulkan dan

dianggap bertentangan dengan UU No. 43 Tahun 2008, sehingga menimbulkan kemiskinan dan kemelaratn masyarakat pada daerah-daerah dengan karakteristik kepulauan.

Untuk itu, sebagai wakil daerah kepulauan dia mendukung dan ikut berjuang pembahasan RUU ini, pandangan dan pendapat Pemerintah kiranya dapat dijadikan sebagai dasar atau argumen dalam pembahasan RUU PPDK. (tt)foto:wy/parle

Komisi VII DPR Tinjau Kondisi Danau Sentani

Tim Kunlap Spesifik Komisi VII DPR melakukan kunjungan ke Provinsi Papua, guna memantau situasi dan kondisi perairan Danau Sentani terkini.

Dasalnya, Danau Sentani merupakan salah satu dari 15 danau prioritas yang dikelola dan dijaga keasriannya oleh Pemerintah sebagai tindak lanjut Konferensi Danau I tahun 2009.

“Upaya-upaya menjaga danau itu jauh lebih penting daripada kita keuarkan energi untuk memperbaiki danau rusak. Itulah konsep untuk Danau Sentani, yang memang masih bagus, belum mengalami kerusakan,”ungkap Ali Kastella saat memimpin Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke Danau Sentani Selasa (25/9).

Menurut Ali Kastella, Tim ingin melihat langsung kondisi di lapangan seperti apa koordinasi di instansi pemerintah maupun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengendalian Danau Sentani.

Lebih lanjut Ali Kastella menegaskan bila masalah yang berhubungan dengan pencemaran danau yaitu sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat terjadi karena memang maraknya pemukiman di kawasan danau karena itu seharusnya pemukiman sekitar ditata sedemikian rupa sehingga tidak memberi dampak yang lebih besar pada ekosistem.

Ditemui Bupati dan Walikota Jayapura terungkap bahwa pemerintah



Anggota Komisi VII Ali Kastella duduk disamping nahkoda saat meninjau Danau Sentani

dan partisipasi masyarakat dalam organisasi pengolahan danau telah ada tapi belum terkoordinasi dengan baik.

Deputi bidang Ekosistem Air Kementerian Lingkungan Hidup Hermono Sigit menjelaskan bahwa Konsep di Sentani beda dengan konsep di beberapa tem-

pat yang sudah ditinjau sebelumnya. “Sentani lebih ke arah pencegahan. Kalau Rawa Pening, Danau Limboto itu pemulihan. Luar biasa nanti effortnya. Nah mumpung masih dalam kondisi dini, maka terapi lebih mudah,” jelasnya. (ray) foto:ry/parle

Pemerintah Beri Masukan Terkait RUU Sediaan Farmasi

Pansus RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga DPR RI memberikan apresiasi terhadap paparan dari Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dan Kepala Badan POM RI dan akan menjadi bahan dalam pembahasan Daftar inventaris Masalah (DIM).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus Abdurahman Abdullah diakhir rapat Pansus RUU Pengawasan Sediaan Farmasi dengan Dirjen Binfar dan Alkes Kementerian Kesehatan, Kepala Badan POM dan Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/9)

Rapat Pansus RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga DPR RI menyepakati beberapa poin yang perlu diperhatikan antara lain adanya pengaturan tentang sosialisasi hasil uji laboratorium khususnya terhadap bahan berbahaya yang dapat dikonsumsi masyarakat, penjelasan tentang definisi “pangan olahan”, adanya pengaturan tentang tata niaga dan tata industry, adanya pengaturan tentang penguatan PPNS di dalam badan pengawas dan adanya perlindungan terhadap industri nasional.

Pansus RUU tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga DPR RI juga meminta kepada Dirjen Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan paparan pada RDP Pansus selanjutnya.

Dalam rapat pansus tersebut, Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI mengusulkan perubahan judul menjadi “RUU Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Pangan Olahan”.

Dirjen Binfar dan Alkes Kementerian Kesehatan juga memberikan masukan perlunya menambahkan substansi mengenai “Hak dan kewajiban semua pemangku kepentingan (pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat/konsu-



Wakil Ketua Pansus Abdurahman Abdullah

men)”, “Tanggungjawab Pemerintah”, “Penetapan penggolongan obat, obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan”, “praktik kefarmasian dan penggunaan secara rasional obat dan alat kesehatan”, perlunya pengaturan khusus tentang “Obat Asli Indonesia” dan “Obat esensial Nasional dan Obat Generik”.

Sementara Kepala Badan POM RI minta dipertimbangkan dalam RUU

ini pengaturan mengenai “Pengawasan terhadap Pangan Olahan”, perlu ditambahkan Bab tentang “Penyidikan untuk konsistensi dengan Fungsi Pengawasan”, “Sanksi administratif”, “Upaya Pengawasan dalam Bab tersendiri setelah Bab tentang Fungsi Pengawasan”, dan mengenai “Pembinaan dalam rangka Pengawasan”. (sc), foto : wahyu/parle.



Jajaran Dirjen Bina kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

Standardisasi Madrasah, Perlu Lembaga Penjamin Mutu Khusus Madrasah

Madrasah dituntut memiliki kualitas atau mutu yang kurang lebih sama dengan sekolah umum dalam segala aspeknya. Maka untuk dapat memenuhi tuntutan kualitas atau mutu tersebut, minimal madrasah harus mempunyai standar yang jelas.



Dialog Komisi VIII DPR dengan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Perlunya lembaga penjamin mutu khusus untuk pengelolaan madrasah menjadi salah satu masukan penting pada Rapat Dengar Pendapat Panja Madrasah Komisi VIII dengan Pusat Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (PLP Ma'arif NU), Rabu 19/9 di ruang rapat Komisi VIII DPR.

"Paling tidak standarnya jelas. Adanya semacam akreditasi, bisa menjamin mutunya, untuk memastikan pendidikan madrasah ini di tingkat SD SMP betul-betul mutunya sesuai, setara sekolah nasional, Bahkan kalau saya berpendapat mestinya lebih bagus, karena selain sesuai standar pelajaran ditambah dengan materi agama unggul yang bisa menjadikannya bernilai plus pada pendidikan itu" tambahnya anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso.

RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Jazuli Juwaini ini mengagendakan pemetaan permasalahan

dan masukan dalam penyelenggaraan madrasah terkait dengan peningkatan mutu serta daya saing madrasah. Para Pengurus PLP Ma'arif NU mengemukakan berbagai persoalan terkait diskriminasi sistem pendidikan nasional. "Persoalan diskriminasi ini berdampak pada mutu madrasah, khususnya madrasah swasta yang jumlahnya 80% dari jumlah keseluruhan madrasah di Indonesia. Perhatian pemerintah sangat kurang terhadap madrasah swasta, terutama dalam hal alokasi anggaran negara," kata Wakil Ketua Pengurus PLP Ma'arif Masduqi Baidlawi.

Masduki menambahkan, bahwa realita banyaknya jumlah madrasah swasta itu harusnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan alokasi anggaran pendidikan. "Seperti yang sudah diketahui, bahwa seluruh jumlah madrasah terdiri dari 80% madrasah swasta, dan sisanya 20% madrasah negeri. Jika peme-

rintah ingin memperbaiki mutu pendidikan madrasah, maka seharusnya 80% alokasi anggaran bantuan yang ada digelontorkan ke madrasah swasta," tambahnya.

Peningkatan mutu pendidikan madrasah yang setara program pendidikan nasional harus terselenggara mulai dari pendiriannya meliputi sarana prasarana dan tenaga pendidik dengan dukungan dana anggaran pemerintah. Sehingga tidak terkotakkan bahwa madrasah itu hanya binaan Kementerian Agama.

"Mestinya pemerintah daerah bekerja sama dengan Kemdikbud (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersama-sama melaksanakan program. Misalnya guru-guru madrasah itu bisa saja ditraining oleh Kemdikbud dengan dukungan dari APBD juga, karena kualitas masyarakat jadi tanggung jawab pemerintah," jelas Sumarjati. (ray) foto:wy/parle

Theodorus Jakob Koekerits Meninggal Dunia

Inalilahi wainilahi Rojiun, telah meninggal dunia Anggota DPR Theodorus Jakob Koekerits atau biasa dipanggil Ondos atau bang ondos karena kecelakaan lalu lintas di Tol Porong.

Beliau dilahirkan di Makasar pada tahun 1962 dan dibesarkan di kota yang sama dengan kelahirannya. Ondos merupakan alumni dari salah satu kampus terbaik di Indonesia, yaitu Institut Teknologi Bandung.

Diantara anggota lainnya, Ondos termasuk anggota yang dikenal bersahaja dan selalu aktif turun ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerahnya.

“Beliau Ondos merupakan sahabat saya dan satu almamater di ITB, dan sudah mengenal dari tahun 1982,” kenang Wakil Ketua DPR Pramono Anung, sekaligus rekan satu partainya di PDIP.

Menurut Pramono, dirinya yang pertama mengajak aktif di partai sekaligus menjadi anggota Dewan. “Dia orangnya sangat sederhana dan telah menjadi dua periode menjadi anggota Bangar, Ondos tidak seperti anggota lainnya, bahkan untuk merenovasi rumahnya beliau tidak punya biaya, hingga saya bantu,” paparnya.

Dia mengatakan, sebagai anggota DPR, Ondos selalu berkomitmen terhadap Dapilnya, bahkan selama lebih 2 minggu dia turun ke daerahnya. “Yah hampir dua minggu turun ke lapangan dan ketika kejadian baru dari Blitar untuk mengejar pesawat pagi hari,” jelasnya.

Mengenang seorang Ondos, dirinya memutuskan menjadi aktivis kampus termasuk menentang rezim Order Baru yang diakhiri dengan aksi mogok makan ketika menolak kehadiran penguasa di dalam kampus pada tahun 1989. Selepas lulus kuliah, keinginan Ondos untuk menjadi dosen tidak mendapat lampu hijau oleh pihak kampus yang ketika itu masih sangat takut terhadap rezim penguasa.

Ondos bekerja di Grup Kompas-Gramedia lebih dari 10 tahun hingga akhir karirnya menjadi editorial. Kegemarannya untuk membaca berbagai



Upacara persemayaman jenazah Theodorus Jakob Koekerits



Wakil Ketua DPR Pramono Anung memberikan sambutan pelepasan jenazah

buku membuat wawasan sangat luas di berbagai bidang pengetahuan.

Bang Ondos tidak hanya sekedar menyelesaikan masalah jangka pendek, tapi Ondos sangat peduli pada pengembangan daerah jangka panjang terbukti dengan observasi yang dilakukan pada puluhan desa di kabupaten Blitar. Observasi ini bertujuan untuk mencari solusi teknologi hingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi pedesaan dan memberi masukan pada

pemerintah daerah agar pembangunan desa tepat sasaran.

Ondos meninggal dunia karena kecelakaan yang terjadi di tol Porong Km 29 arah Porong-Waru, Jenazah anggota DPR RI dari komisi I itu meninggal dunia di RS Delta Surya Sidoarjo setelah sempat dirawat. Warga Jalan Aster Blok F No.5-8 Sektor I Griyaloka BSD Tangerangpun dirujuk ke RSUD Sidoarjo.(si)/foto:tim parle.

Komisi X DPR Setujui Anggaran Perpustakaan Rp. 424 Miliar

Komisi X DPR menyetujui pagu anggaran sementara Perpustakaan Nasional RI dalam RAPBN TA 2013 sebesar Rp. 424 miliar yang terdiri dari anggaran fungsi pendidikan dan anggaran non fungsi pendidikan.



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto memberikan penjelasan terkait anggaran Perpustakaan TA 2013.

Demikian yang di katakan Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto yang sekaligus memimpin rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI Sri Sularsih, di Gedung Nusantara II, Senin (24/9) sore.

Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto menambahkan, Komisi X DPR belum dapat menyetujui program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perpustakaan Nasional RI. "Ini harus diperdalam lagi masalah program kegiatannya berdasarkan fungsi dan subfungsinya,"ujarnya.

Untuk itu, Lanjut Utut bahwa Komisi X DPR bersama-sama dengan Kepala Perpustakaan nasional RI harus sepakat bahwa rincian alokasi anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2013 akan dibahas kembali dalam waktu dekat.

Selain anggaran tersebut diatas, Perpustakaan Nasional RI juga mengajukan usul tambahan sebesar Rp.

155 miliar lebih yang akan dialokasikan sebagai tambahan anggaran pembangunan fasilitas layanan Perpustakaan Nasional di Jl. Medan Merdeka No.11 Jakarta Pusat sebesar Rp 114 miliar lebih, serta tambahan anggaran untuk operasional UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi sebesar Rp.6,5 miliar.

Pimpinan Sidang Komisi X DPR Utut Adianto mengemukakan, terkait dengan pengajuan usul tambahan anggaran Perpustakaan Nasional, yang totalnya Rp. 155 miliar lebih, Komisi X DPR mendukung usulan tersebut agar dapat terpenuhi dari anggaran fungsi pendidikan, untuk itu Kepala Perpustakaan Nasional segera menyampaikan usulan tersebut kepada Menteri Keuangan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Utut Adianto menegaskan, bahwa Komisi X DPR memberi beberapa catatan seperti program/kegiatan yang disusun diharapkan menjadikan Perpustakaan yang ideal dengan me-

numbuh kembangkan pembudayaan orang gemar membaca, juga harus ada perhatian yang sungguh-sungguh terhadap Perpustakaan di daerah yang relatif masih tertinggal, serta ada indikator kinerja pengawasan intern perpustakaan Nasional harus diukur secara jelas dan nyata.

Dia juga mengatakan, perlu ada alokasi anggaran untuk program asistensi/pelatihan pustakawan, mengkaji secara komprehensif efektifitas program/kegiatan bantuan perpustakaan desa, perlu adanya klasifikasi yang jelas terhadap tugas dan fungsi sebagaimana amanat UU No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan nasional, juga harus ada alokasi anggaran untuk pembangunan gedung perpustakaan daerah untuk beberapa daerah yang sudah tidak layak, serta perlu ada klarifikasi terhadap gaji dan tunjangan pustakawan tidak termasuk dalam anggaran fungsi pendidikan.

Sementara itu Kepala Perpustakaan Nasional RI Hj. Sri Sularsih mengakui pihaknya telah mengajukan anggaran kepada Pemerintah sebesar 424 miliar lebih, yang memang masih memerlukan pendalaman baik dari sisi jenis belanja, alokasi anggaran, maupun efektifitas program/kegiatan.

Hj. Sri Sularsih menambahkan, alokasi anggaran perpustakaan Nasional tahun 2013 untuk program pembangunan perpustakaan seluruhnya berasal dari fungsi pendidikan dan terdapat perbedaan alokasi anggaran RKAKL dengan nota keuangan RAPBN TA 2013 yang terletak pada kegiatan perencanaan, Hukum, Humas, Ortala, Monitoring dan Evaluasi Perpustakaan Nasional belum ditetapkannya kode kegiatan baru untuk Kegiatan pengawasan Intern Perpustakaan Nasional yang sudah diusulkan kepada Menteri keuangan dan Bappenas, tegasnya. (Spy).foto:wy/parle

DPR Minta Kemendagri Selesaikan Kekurangan Perekaman e-KTP

Komisi II DPR meminta Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyelesaikan kekurangan pelayanan perekaman e-KTP sebanyak 24.603.431 orang penduduk wajib KTP, sehingga penyerahan/pendistribusian DAK2 dari pemerintah kepada KPU dan dari Pemda kepada KPUD dapat dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2012.

Demikian salah satu butir kesimpulan yang dibacakan Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa saat Raker dengan Mendagri Gamawan Fauzi di gedung DPR, Jakarta, Senin (24/9)

Selanjutnya, Komisi II DPR juga meminta Kemendagri untuk mempercepat pendistribusian fisik e-KTP melalui Pemda kepada seluruh warga masyarakat yang telah melaksanakan perekaman data e-KTP.

Komisi II DPR juga menugaskan Kementerian Dalam Negeri untuk mensosialisasikan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, yang mengatur bahwa e-KTP merupakan identitas tunggal dan efektif di Tahun 2013 serta lebih mengoptimalkan koordinasinya dengan seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat



Suasana raker Komisi II DPR RI dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri

untuk memberikan gambaran yang utuh akan manfaat dan kelebihan dari KTP berbasis elektronik.

Terhadap rencana pelaksanaan Pemilu serentak, Komisi II DPR RI dapat menerima penjelasan Kement-

rian Dalam Negeri dengan berbagai alternatif untuk selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam pembahasan RUU Pemilu Kepala Daerah.(nt), foto : wahyu/parle.

Komisi VII DPR Desak Pemerintah Tetapkan Perpres Tata Ruang Danau Toba

Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan baik, dan perlu segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tata Ruang Kawasan Danau Toba.

Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana saat memimpin Panitia Kerja (Panja) 15 Danau Prioritas Komisi VII DPR ke Danau Toba, Sumatera Utara.

Panja meninjau Danau Toba Provinsi Sumatera Utara Senin hingga Rabu (24-26/9), dipimpin Sutan Bathoegana (F-PD), didampingi Daryatmo Mardiyanto (F-PDIP), Nazarudin Kiemas (F-

PDIP), Milton Pakpahan (F-PD), Syaifudin Donowijoyo (F-P.Gerindra), Martri Agoeng (F-PKS) mendapatkan masukan dari Jajaran Pemerintah daerah Sumatera Utara.



Budidaya ikan pola keramba jaring apung di Danau Toba

Dalam kesempatan Tim Panja DPR meninjau langsung dan mendapatkan informasi tentang permasalahan pencemaran danau Toba serta akibat dan dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Panja mendapatkan informasi tentang pengelolaan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam penanganan masalah Danau Toba, khususnya permasalahan pencemaran danau yang diakibatkan keramba jaring apung oleh PT. Aquafarm Nusantara dan limbah peternakan Babi oleh PT. Allegrindo Nusantara.

Politisi Partai Demokrat Milton Pakpahan mengatakan Pemerintah harus dengan tegas melaksanakan UU 32 tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 22 ayat (1) yang mengatur setiap badan usaha dan kegiatan yang berdampak lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Selain itu melakukan tindakan tegas sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat(1) mengenai sanksi administrative berupa teguran tertulis, pembekuan dan pencabutan izin serta sanksi pidana penjara atau denda apabila melanggar.

Anggota DPR Daryatmo menegaskan Pemerintah harus segera menetapkan Perpres Tata Ruang Danau Toba. Karena menurutnya Pemerintah Daerah sangat memerlukan kepastian hukum sebagai pedoman menjalankan kegiatan dan kebijakan, termasuk dalam menetapkan kebijakan tata ruang kabupaten.

Permasalahan lingkungan di kawasan danau Toba, menurut Badan Lingkungan Hidup Provinsi, Sumut Rismawati Simanjuntak ialah masalah pencemaran dari domestik (rumah tangga dan hotel) dan perikanan. Untuk itu, dia mengusulkan perlu ada ipal komunal yang dipusatkan kegiatan di sekitar danau Toba khususnya di kabupaten samosir, Simalungun, dan toba samosir. "Perlu ada ipal komunal untuk pelayanan kepada domestik dan perhotelan. Dengan adanya uni diharapkan perhotelan membayar retribusi nantinya karena adanya fasilitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah," katanya.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah sangat memerlukan kepastian hukum dengan ditetapkan

kannya Perpres Tata Ruang Danau Toba. Hal ini sangat penting karena untuk pedoman menjalankan kegiatan dan kebijakan, termasuk dalam menetapkan kebijakan tata ruang kabupaten.

"Dalam peruntukannya melakukan kegiatan di danau Toba, perlu adanya klausul harus dengan daya dukung dan tampung, yaitu adalah kemampuan perairan danau Toba untuk mendukung atau menerima beban pencemaran dari kegiatan-kegiatan yang ada di danau Toba," tambahnya.

Selanjutnya, perlu ada penekanan kegiatan yang harus berwawasan lingkungan dan sebaiknya pengembangan perikanan tangkap yang ramah lingkungan, serta perlu kapal khusus penangkap sampah.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, mengharapkan didukung peralatan pemantauan kualitas danau Toba secara on line (monitoring on line) yang setiap saat dapat membaca perkembangan kualitas perairan danau Toba untuk memiliki dasar data yang cepat dan pada akhirnya dapat melakukan tindakan yang cepat terkait dengan kualitas air Danau Toba.

Selain itu perlu pemulihan kualitas air danau Toba dengan penerapan bioteknologi untuk membersihkan perairan atau mengurangi serta mereduksi beban pencemaran air Danau Toba dengan menggunakan bakteri dengan Teknologi aquaclean. (as), foto : agung s/parle.



Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR mengunjungi pengolahan limbah PT Allegrindo Nusantara, Medan

Baleg Siapkan Penyusunan RUU Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai menyiapkan penyusunan RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. RUU ini merupakan usul inisiatif Baleg dan masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2012.

Rapat Pleno Baleg, Selasa (25/9) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub, siang itu selain mendengarkan presentasi Tim Ahli juga ingin mendapatkan tanggapan dan masukan-masukan dari anggota Baleg.

Sunardi berharap, pada Masa Persidangan I ini RUU sudah dapat dimintakan masukan dari beberapa nara sumber dalam menyempurnakan draft RUU.

Dalam rapat ini disepakati, sebelum melakukan penyempurnaan lebih jauh terhadap RUU tersebut, Baleg akan melakukan kunjungan ke beberapa daerah terkait dengan RUU dimaksud.

Daerah yang akan dikunjungi adalah Provinsi Sumatera Barat, Papua, Bali dan Provinsi Kalimantan. Empat provinsi menjadi tujuan kunjungan Baleg dikarenakan daerah tersebut banyak permasalahan masyarakat adatnya dan merupakan daerah yang berpotensi soal tanah adat.

Kunjungan ke empat provinsi ini diharapkan dapat lebih menyempurnakan draft RUU tersebut dengan mendapatkan berbagai masukan-masukan berharga dari masyarakat adat setempat.

Sunardi mengatakan, keberadaan RUU ini sangat penting mengingat masyarakat hukum adat selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat.

Belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat yang bersifat komunal mengaki-



suasana rapat baleg

batkan munculnya konflik di masyarakat hukum adat sehingga menimbulkan ancaman stabilitas keamanan nasional.

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang.

Tujuan pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat diantaranya adalah melindungi hak masyarakat hukum adat agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.

RUU ini juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya dan melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat hukum adat.

Sunardi mengatakan, RUU ini perlu



Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub

dibahas secara hati-hati, sehingga lahirnya UU ini dapat memberikan kejelasan. Karena, katanya, Baleg tidak ingin UU ini lahir bertentangan dengan UU Agraria.

Rencananya setelah melakukan kunjungan ke beberapa daerah, Baleg akan mengundang pakar-pakar, akademisi dan *stakeholders* terkait lainnya untuk dapat menyempurnakan naskah akademis.(tt)foto:wy/parle

WAIPA Sepakat Perempuan Parlemen Miliki Peran Penting Dalam Percepatan MDGs

Woman Parliamentarians of AIPA (WAIPA) sepakat perempuan parlemen memiliki peran penting dalam percepatan Millenium Development Goals (MDGs), mengingat sebagian pencapaian MDGs bersentuhan langsung dengan perempuan seperti kesehatan ibu dan anak.



Tim Delegasi Indonesia AIPA ke 33 di Lombok



Ida Ria Simamora, Delegasi Indonesia di AIPA

Anggota Delegasi Indonesia Ida Ria Simamora menyampaikan laporan Komisi WAIPA pada Sidang Pleno ke dua AIPA, Jum'at (21/9) di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pada sidang sebelumnya telah disepakati WAIPA membahas tiga draft resolusi yaitu draft resolusi dukungan anggota Asean dalam memperkuat kerjasama dalam menerapkan roadmap Millenium Development Goals untuk memperkecil gaps diantara anggota Asean.

Draft Resolusi yang ke dua adalah draft resolusi mengenai peran parlemen perempuan dalam memperkuat kebijakan yang pro-perempuan di ber-

bagai sektor seperti ekonomi, kesehatan dan pendidikan.

Berikutnya, draft resolusi peningkatan pembangunan kapasitas dan pelatihan khusus bagi perempuan di pedesaan. "Ke tiga draft ini telah disepakati bersama pada sidang Komisi WAIPA sebelumnya," katanya.

Dalam upaya peningkatan kapastitas perempuan di perdesaan, WAIPA juga menyepakati bahwa parlemen perlu mendorong pemerintah untuk menyediakan akses yang layak terhadap kesehatan dan pendidikan.

Dalam konteks kebijakan yang pro-perempuan, juga didiskusikan pentingnya peningkatan peran perempuan untuk duduk sebagai aktor kunci di *policy and decision making process*.

Resolusi ini difokuskan pada pemberdayaan perempuan karena peran penting perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Rancangan resolusi ini juga fokus pada pelaksanaan program pemerintah yang menyediakan akses yang lebih baik dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah, ini adalah

untuk mendukung wanita yang membutuhkan modal lebih besar atau layanan pembiayaan dari lembaga keuangan untuk memulai atau memperluas bisnis mereka.

Resolusi ke dua diusulkan oleh Indonesia berdasarkan kesadaran bahwa ekonomi, kesehatan dan pendidikan sangat penting dalam upaya pembangunan keluarga. Oleh karena itu, anggota parlemen perempuan harus memastikan elemen-elemen yang mendukung kebijakan pro-perempuan.

Anggota parlemen perempuan juga perlu pengawasan pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, rancangan resolusi juga mencakup dorongan bagi anggota parlemen perempuan untuk menginspirasi, mengembangkan mentor muda di negara mereka, serta untuk memasukkan program pembangunan perempuan muda dalam kampanye mereka.

Resolusi ke tiga diusulkan delegasi parlemen perempuan Indonesia berdasarkan kesadaran bahwa anggota parlemen harus mendukung program-program pemerintah yang menjamin akses kesehatan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan di daerah perdesaan atau terpencil.

Oleh karena itu, resolusi WAIPA harus mencerminkan komitmen untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam akses pendidikan dan kesempatan keuangan atau ekonomi.

Selain bersidang, WAIPA juga menggelar sesi diskusi informal melalui *Working Lunch* dengan UN Women. UN Women ingin bekerja sama dengan perempuan parlemen Negara Asean dalam mengintrodusir kebijakan yang pro-gender dalam legislasi. (tt)/foto:iwan armanias/parle.

AIPA Belajar dari Krisis Keuangan Eropa

Upaya bangkit dari krisis keuangan menjadi topik hangat pembicaraan anggota parlemen negara-negara Asean – AIPA dalam sesi dialog dengan delegasi peninjau, Parlemen Eropa.

Pengalaman negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa itu dinilai dapat menjadi pelajaran berharga bagi Asean yang terus berkembang.

“Krisis keuangan yang menimpa beberapa negara Eropa dinilai berkepanjangan dan menimbulkan friksi di organisasi bangsa Eropa ini. Kita memanfaatkan kesempatan dialog dengan Parlemen Eropa untuk menggali lebih jauh persoalannya, bagaimana mereka bisa bertahan sejauh ini,” kata Evita Nursanty, anggota delegasi Indonesia dalam Sidang Umum ke-33 AIPA di Lombok, NTB, Rabu (19/9/12).

Evita yang juga bertindak selaku pimpinan sidang mengingatkan dengan pemahaman terhadap krisis tersebut diharapkan membantu anggota parlemen di Asean untuk mencegah hal tersebut terjadi dikawasan ini sesuai fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Disamping krisis, peserta dialog juga menanyakan tentang eksistensi mata uang tunggal Uni Eropa yai-

tu Euro.

“Kita bertanya bukan berarti Asean juga dalam posisi berminat untuk mencoba menerapkan mata uang bersama seperti Uni Eropa. Kita masih harus belajar lebih banyak dulu,” tambah politisi Fraksi PDIP ini. Selain masalah keuangan dialog antar parlemen ini juga diwarnai pembicaraan tentang upaya penguatan SDM, kerja sama dibidang penelitian, pertanian, pangan dan kehutanan.

Anggota delegasi Indonesia Ida Ria Simamora dalam pertemuan itu juga menyampaikan agar parlemen Eropa mendukung peningkatan jumlah mahasiswa penerima bea siswa. Isu lain yang dikemukakannya adalah tentang upaya penguatan kerja sama dalam masalah perubahan iklim. Ia berkeyakinan peran parlemen kedua negara berperan signifikan dalam meningkatkan hubungan antar kawasan.

Robert Goebbels, Ketua Delegasi Parlemen Eropa menyampaikan apresiasi atas pesatnya pertumbuhan

negara-negara yang tergabung dalam Asean. Terkait gejala krisis keuangan di beberapa negara Eropa ia menyampaikan optimisme dalam waktu yang tidak lama akan dapat dituntaskan. “Financial crisis akan segera berlalu dan upaya memperkuat euro sudah berada pada jalur yang benar,” kata dia.

European Parliament mewakili sekitar 496 juta warga Uni Eropa. Pasca pemilihan umum 2009 lalu disepakati jumlah maksimum anggotanya 750 orang, dengan ambang minimum 5 orang untuk setiap negara anggota. Pemilu diadakan setiap lima tahun sekali, dan setiap orang dewasa mempunyai hak suara.(iky)/foto:iwan armanias/parle.



Evita Nursanty (kanan) pada sidang AIPA dalam sesi dialog dengan delegasi peninjau, Parlemen Eropa

Komunikasi Intensif Antar Parlemen Asean Harus Ditingkatkan

Komunikasi antar parlemen negara Asean harus ditingkatkan guna mendorong tercapainya implementasi resolusi yang telah dihasilkan pada Sidang Umum AIPA ke 33 di Senggigi Lombok, NTB.



Ketua BKSAP Surahman Hidayat (tengah)

“Setiap resolusi itu harus ada monitoring dan evaluasi terus menerus guna mengetahui implementasi dan kemajuannya di kawasan Asean,” ujar Ketua BKSAP Surahman Hidayat se usai sidang Komite Organisasi AIPA, di Senggigi Sentosa, Mataram, NTB, Rabu, (19/9).

Terkait Organisasi AIPA, Surahman mengatakan, mayoritas delegasi Parlemen Asean menekankan fungsi dan prinsip Setjen AIPA yang mengedepankan efektivitas, dan kehati-hatian dalam menggunakan anggaran Setjen AIPA.

“Komite organisasi AIPA ini paling berat tugasnya khususnya membahas mengenai laporan keuangan AIPA, yang paling utama kita semua menginginkan prinsip akuntabilitas, responsibilitas, dan prinsip prudensial dalam menangani organisasi AIPA,” ujarnya

Dia mengharapkan, Sekjen AIPA dapat memperkuat kinerja kesekjen secara menyeluruh. “Kita harapkan Singapura dapat meningkatkan kinerjanya, karna kesekjen ini merupakan motor dari penggerak AIPA,” tambahnya.

Ditanya harapannya terhadap Brunei Darussalam yang akan menjadi tuan rumah Sidang Umum Inter-Parlemen Asia Tenggara atau AIPA ke-34 pada September 2014, Surahman mengatakan, Brunei diharapkan dapat bekerja lebih maksimal untuk penyelenggaraan sidang AIPA 2014 mendatang. “Kita harapkan dapat bekerja baik, karena memang memiliki keung-

gulan finansial dan lainnya. terkait SDM bisa dibackup oleh delegasi anggota lainnya termasuk Indonesia,” papar Surahman.

Komite Organisasi merupakan komite yang membahas 11 item agenda yang krusial terkait organisasi AIPA, diantaranya, memutuskan draft resolusi terkait laporan tahunan Setjen AIPA 2011-2012, laporan Kaukus ke-4 di Thailand, draft resolusi proposal anggaran Setjen AIPA untuk periode Oktober 2012-30 September 2013.

Draft resolusi dan penetapan technical working group di bawah AIFOCOM, Kantor setjen AIPA, draft resolusi proposal pengembangan dukungan agenda legislasi hijau (dukungan teknis dari Asean-Wildlife eforcement network dan freeland foundation), penetapan kerjasama antara AIPA dan Asean Foundation, hubungan dan kerjasama antara AIPA dan Parlemen Pan Afrika, Draft resolusi penetapan tanggal dan tempat untuk Sidang Umum AIPA ke 34, terakhir yaitu draft resolusi penghargaan terhadap kepemimpinan Presiden AIPA Marzuki Alie dari Oktober 2011-September 2012. (si)/foto: iwan armanias/parle.



Suasana rapat AIPA Komisi Bidang Organisasi

DPR Akan Pangkas Perjalanan Dinas Hingga 40 Persen

Pimpinan DPR dan Badan Anggaran DPR RI berkomitmen untuk memangkas perjalanan dinas sebesar 30-40 persen dari seluruh Kementerian dan lembaga pemerintah sebagai bentuk respons masyarakat terhadap perjalanan dinas.



Pimpinan DPR RI saat memberikan konferensi Pers terkait dengan pemangkasan anggaran perjalanan dinas Anggota DPR

“Ini merupakan cara DPR menyikapi suara keinginan masyarakat yang mengkritisi pengeluaran lembaga dan kementerian terkait perjalanan dinas,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat konferensi Pers, Senin, (24/9).

Selain itu, Rapat Koordinasi Pimpinan DPR juga menyepakati menurunkan belanja barang sebesar 20 persen dan memindahkan ke belanja modal un-

tuk program-program pro rakyat.” Kita akan mengoptimalkan hingga 40 persen dan sedikitnya 30 persen dan diharapkan akan menghemat Rp 6-8 triliun ini diharapkan dapat untuk pembangunan infrastruktur,” ujarnya.

Dia menegaskan, ini merupakan usaha DPR dalam menekan biaya yang tidak penting kemudian diarahkan untuk kepentingan rakyat dan infrastruktur. “Kita mengharapkan alokasi ini di-

arahkan untuk dana infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan program pro rakyat dalam mengurangi angka kemiskinan,” paparnya.

Menurut Marzuki, Pimpinan DPR dan Banggar DPR juga memutuskan cost recovery sebesar 15,5 persen, sementara Khusus tax ratio 12,75 persen jadi 12,87 persen.

Ketua Banggar DPR Achmad Noor Supit dari Partai Golkar mengatakan, Perjalanan dinas itu banyak yang mubazir bahkan dikementerianpun bisa lebih parah. “Paling tidak ini ada kesepakatan politik, karena itu saya berusaha keputusan ini dapat berjalan. Ada tuntutan politik juga dari masyarakat saya ajak pemerintah juga berpikir secara politis,” paparnya.

Menurutnya, DPR mengharapkan tahun 2013 ini bisa terlaksana. “ini baru internal saya konsultasikan pimpinan dulu dan juga telah dibicarakan di internal Banggar, mudah-mudahan dapat menjawab respon rakyat,” terangnya. (si), foto : eka hindra/parle.



Suasana konferensi Pers dengan Pimpinan DPR RI di ruang Rapat Pimpinan DPR



Tim Kunker Komisi VII DPR RI dipimpin Soetan Bhatoegana mengunjungi pengelola peternakan PT. Allegrindo Nusantara Terkait Pengolahan Limbah. Selasa (25/09), foto :Agung S.



Anggota Panja Danau komisi VII Ahmad Rilyadi dan Jamaludin Jafar bertemu dengan perwakilan masyarakat setempat saat meninjau Danau Sentani, Jayapura, provinsi Papua. Selasa (25/09), foto: Rizka



Ketua BKSAP Surahman Hidayat didampingi Gubernur Provinsi NTB M. Zainul Majdi menyambut kedatangan PM Kamboja Hunsen di Bandara Internasional Lombok dalam rangka Sidang AIPA Ke 33. Senin (17/09) foto:Iwan Armanias



Ketua DPR RI Marzuki Alie melantik Anggota PAW Efi Susilowati dari Partai Demokrat dan Ryani Soedirman dari Partai Golongan Karya di Gedung Nusantara DPR RI. Rabu (26/09), foto :Wahyu



Foto bersama Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Scott Marciel se usai diterima Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah di Gedung Nusantara I DPR RI. Senin (24/09), foto ;Wahyu.